

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan implikasi *One China Policy* terhadap kerjasama ekonomi Indonesia-Taiwan berdasarkan permasalahan wilayah kekuasaan antara Tiongkok dengan Taiwan. Kebijakan “Satu Tiongkok” (*One China Policy*) merupakan keputusan yang dilakukan Tiongkok untuk menyatukan dan memberikan kekuasaan dalam menjalin hubungan diplomatik Tiongkok dengan negara lain. Posisi Taiwan yang termasuk dalam permasalahan adanya *One China Policy* membatasi hubungan luar negeri Taiwan, negara Tiongkok lebih unggul dalam pergerakan diplomatik dengan negara-negara termasuk Indonesia. Pengakuan kebijakan *One China Policy* oleh Indonesia membuktikan bahwa tidak ada hubungan diplomatik dengan Taiwan. Tantangan kerjasama Indonesia dengan Taiwan dalam segi politik memiliki batasan, namun dalam kerjasama ekonomi Indonesia-Taiwan dapat dibuktikan dalam forum kolaborasi antar kedua negara. Akan tetapi, permasalahan geopolitik yang mencangkup *One China Policy* dapat memberikan dampak bagi ekonomi politik internasional.

Secara historis, Tiongkok mengklaim Taiwan berdasarkan tiga alasan, yaitu kepemilikan historis, pencabutan hak milik dari perjanjian Shimonoseki, dan deklarasi kairo. Pertama, landasan historis atas klaim bahwa Taiwan bagian dari daratan Cina yang juga menjadi wilayah Tiongkok, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum internasional. Hukum internasional hak klaim teritorial berdasarkan kepemilikan historis. Kedua, pembatalan perjanjian Shimonoseki, yang terjadi pada perjanjian ini ketika Jepang melancarkan agresi melawan Tiongkok. Dampak dari perjanjian tersebut adalah Tiongkok melepaskan Taiwan dari wilayahnya. Namun, pemerintah Tiongkok melihat klaim atas Taiwan dalam perjanjian

Shimonoseki tidak setara. Ketika pencabutan hak miliki dilakukan Jepang tidak memiliki pengaruh dalam validitas perjanjian. Ketiga, klaim pemerintah Tiongkok atas Taiwan dalam deklarasi Kairo. Deklarasi Kairo menjanjikan kembalinya Formosa dan Pescado res ke Tiongkok setelah perang (Chiang 2004, 40-42).

Kebijakan klaim atas Taiwan secara historis tersebut tidak dibenarkan secara hukum internasional. Tiongkok tidak dapat memperoleh klaim atas Taiwan kembali dengan cara apapun. Hubungan Tiongkok dan Taiwan tetap tidak dapat dipisahkan meskipun tidak dapat mengklaim secara sah dalam wilayah Taiwan. Adanya *One China Policy* memberikan hak kepada Tiongkok sebagai negara berdaulat atas hak berdiplomatik dengan negara-negara di dunia. Hal ini mengakibatkan hubungan politik luar negeri Taiwan memiliki konsekuensi sebagai wilayah dibawah kekuasaan Tiongkok. Perkembangan akibat dari *One China Policy* terhadap Taiwan pada 1970-an, sekitar setengah dari negara anggota PBB mengakui Tiongkok sebagai pemerintah yang sah. PBB memberikan kursi keanggotaan bagi Tiongkok dan menggeser Taiwan. Kemudian, Tiongkok menegaskan kembali posisinya yang menyebutkan bahwa Taiwan adalah bagian dari provinsi daratan Cina yang dalam pembebasannya merupakan urusan Tiongkok yang tidak dimiliki negara lain hak untuk ikut campur.

Implikasi *One China Policy* (OCP) merupakan kebijakan luar negeri yang diberikan oleh Tiongkok menjadi permasalahan bagi kebijakan luar negeri Taiwan. Menurut Valerie M. Hudson dikutip dari buku yang berjudul *Foreign Policy*, kebijakan luar negeri dipahami sebagai strategi pendekatan yang dipilih oleh pemerintah nasional untuk mencapai tujuannya dalam hubungan dengan entitas eksternal, termasuk keputusan untuk tidak melakukan apapun (Nugroho 2020, 28). Implikasi *One China Policy* merupakan strategi bagi Tiongkok untuk menyatukan kembali Taiwan ke wilayahnya. Tiongkok mengeluarkan proposal "*One Principle and Four Points*" pada tahun 1992. Terdapat 4 prinsip yang diberikan Tiongkok kepada Taiwan. Pertama, mengembalikan hak diplomatik ke Tiongkok. Kedua, menyediakan

dukungan pendanaan bagi Taiwan. Ketiga, menunda reformasi bergaya sosialis di Taiwan. Keempat, menahan diri dari melibatkan pihak lain yang merugikan (Lo 2020, 27). Proposal tersebut memberikan keuntungan untuk Taiwan agar mengembalikan pemerintahan seutuhnya hanya kepada Tiongkok sesuai dengan *One China Policy*. Konsensus Taiwan dan Tiongkok mengenai *One China Policy* cukup rumit di bidang politik internasional. Implikasi *One China Policy* dapat menjadi alat yang menguntungkan kerjasama ekonomi Tiongkok dengan negara-negara lain. Konsensus *One China Policy* mengalami perkembangan, berbagai proses reunifikasi yang dilakukan oleh Tiongkok untuk menyatukan kembali wilayah Taiwan tidak dapat terjadi. Reunifikasi bertujuan untuk upaya penyelesaian masalah kedaulatan. Melalui perkembangannya, hukum dan institusi pada akhirnya menerapkan *One China Policy* dengan kerangka hanya antara kedua belah pihak tanpa ikut campur negara ke negara. Pada tahun 2014 pengertian *One China Policy* mengalami proses reunifikasi dengan kebijakan yang memiliki arti “Satu Negara, Dua Sistem” dengan hal ini, maka dapat memberikan Taiwan hak otonomi khusus (Kan 2014, 87).

Dalam implementasi kebijakan *One China Policy*, eksistensi Taiwan tetap bertumbuh dengan memandang kebijakan tersebut sebagai tantangan. Taiwan menolak berbagai konsensus yang diberikan Tiongkok dan mempertahankan pemerintahannya sendiri. Implikasi *One China Policy* memberikan pengaruh terhadap politik luar negerinya. Sehingga, pemerintah Taiwan sadar jika hanya mengandalkan politik sebagai alat diplomasinya tidak akan dapat menerobos isolasi diplomatik yang dilancarkan oleh Tiongkok, yang posisinya sudah menguat secara signifikan dari tahun 1970-an (Tanasaldy 2017, 13). Pemerintah Taiwan kemudian menggunakan alat kerjasama dalam bidang ekonomi untuk meraih kepentingan hubungan luar negeri.

Hubungan luar negeri antara Taiwan dengan Indonesia terjalin karena kebijakan luar negeri Indonesia yang memiliki prinsip bebas aktif. Prinsip ini menegaskan komitmen Indonesia

untuk bebas dalam menentukan sikap atas masalah-masalah internasional dan terlepas dari kutub-kutub dunia, serta aktif berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan dunia (Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999, 3). Sikap politik luar negeri Indonesia mengedepankan pencapaian manfaat bagi kepentingan nasionalnya. Hubungan luar negeri Indonesia mengakui *One China Policy* sebagai bentuk hubungan diplomatik secara resmi hanya dengan Tiongkok. Akibatnya, hubungan luar negeri Indonesia-Taiwan hanya sebatas ruang lingkup kerjasama ekonomi. Sejauh ini kerjasama ekonomi Indonesia-Taiwan yang mengalami perkembangan terdapat di bidang perdagangan dan investasi.

Dalam menjalankan hubungan diplomatik Taiwan memerlukan adanya pengakuan (*recognition*) dari negara-negara lain, diakui secara *de jure* dan *de facto*. Pengakuan kedaulatan negara adalah pengakuan kekuasaan tertinggi yang biasanya diperoleh dari adanya kemerdekaan suatu negara (Mauna 2018, 73). Dengan belum diakuinya Taiwan sebagai sebuah negara yang berdaulat oleh beberapa negara lain secara *de jure* dalam pengakuan kekuasaan pemerintahan menjadi suatu permasalahan bagi Taiwan untuk menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama yang lebih luas. Hubungan diplomatik secara resmi Taiwan dengan Indonesia belum diwujudkan, karena Taiwan merupakan kawasan yang juga belum diakui Indonesia secara *de jure* sebagai negara yang berdaulat. Indonesia tetap menjalin kerjasama ekonomi tanpa adanya hubungan diplomatik sudah berjalan sejak tahun 1976 saat Taiwan mendirikan sebuah pemerintahan yang terpisah dari Tiongkok (ROC-Taiwan 2016). Ruang lingkup Taiwan menjadi terbatas, karena kekuasaan tertinggi masih ada dalam kendali Tiongkok. Hal ini dibuktikan dari adanya Implikasi *One China Policy* maka sebagian besar negara lebih menjalin kerjasama dengan negara Tiongkok. Kondisi ini membuat Taiwan sendiri mengupayakan dalam pembangunan hubungan dan mencari pengakuan internasional. Namun, hal tersebut tidak menjadi permasalahan ekonomi yang mempengaruhi, dengan adanya otonomi khusus bagi Taiwan maka dapat menjalin kerjasama internasional dengan negara-

negara lain secara tidak resmi. Permasalahannya, implikasi hubungan antara Taiwan dengan Indonesia yang terjalin bukan dari pemerintah ke pemerintah, namun dari aktor non-negara. Misalnya pelaku usaha/pembisnis Indonesia ke Taiwan dan pelaku usaha/pembisnis Indonesia ke Taiwan.

Indonesia mengakui *One China Policy* melalui kebijakan dasar *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tanggal 8 Agustus 1990, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Tiongkok (Mahardika dan Darmawan 2020, 218). Dalam kesepakatan yang ditandatangani yang berupa MoU tersebut juga menjelaskan bahwa Indonesia hanya menjalin hubungan dalam bidang ekonomi dengan Taiwan. Terbentuknya kerjasama ekonomi Indonesia-Taiwan mengalami berbagai perkembangan. Pertimbangan kebijakan dalam membangun kerjasama ekonomi melihat bahwa status Taiwan menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) dan Taiwan memiliki statistik ekonomi dan perdagangan yang baik dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil.

Dalam pembuatan kebijakan, pemerintah Indonesia dihadapkan dengan dilema-dilema yang tidak dapat dipilih dengan mudah. Indonesia memerlukan kebijakan yang tepat dan tidak diskriminatif terhadap hubungan Tiongkok dengan Taiwan. Terbentuknya kebijakan luar negeri adalah turunan dari perpaduan antara ideologi nasional dan kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri merupakan salah satu instrumen dari strategi politik luar negeri (Nugroho 2021, 38). William Coplin (1992) yang dikutip dari buku "*Hubungan Luar Negeri Taiwan : Penentu Kebijakan dan Studi Kasus*" melihat bahwa semakin demokratis politik domestik suatu negara, semakin pluralistis dalam proses perumusan kebijakan. Hubungan Taiwan dengan Indonesia memiliki kepentingan bersama lebih ke arah ekonomi (Tanasaldy 2017, 15). Kemampuan ekonomi suatu negara adalah alat penting politik luar negeri suatu negara. Taiwan dengan Indonesia memiliki hubungan kerjasama yang menguntungkan bagi satu sama lain. Peranan dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dilakukan dengan cara yang positif, melihat

pertimbangan dapat memperkokoh kedudukan politik negara sendiri atau melemahnya politik negara lawan, dan adanya perluasan pengaruh kawasan Indonesia terhadap Taiwan dalam kepentingan kerjasama.

Kerjasama ekonomi Indonesia-Taiwan diwujudkan dalam forum kolaborasi (ITICF). Melalui *Indonesia-Taiwan Industrial Collaboration Forum* menjadi salah satu strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam kerjasama bilateral yang dapat mendorong pertumbuhan investasi melalui aspek industri (Kemenperin 2021). Sebagai kedua negara berkembang yang membangun kerjasama ekonomi memiliki strategi kebijakan luar negeri masing-masing untuk dapat saling bertumbuh dan berupaya adanya perkembangan. Selain kerjasama dalam sektor investasi, Indonesia dengan Taiwan membuka kantor dagang dan ekonomi Indonesia di Taipei menurut Kepres RI no 48 Tahun 1994 dan Indonesia-Taiwan dalam bidang ekonomi menandatangani *Bilateral Agreements Investment Promotion and Protection* sejak Tahun 1990.

Kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia-Taiwan menggunakan strategi pendekatan *Business to Business* yang terus berjalan dan belum terdapat kendala. Dalam kerjasama ekonomi perusahaan-perusahaan Taiwan yang bergerak di bidang teknologi industri tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) realisasi investasi asal Taiwan mencapai US\$ 79-78 juta pada tahun 2014. Jumlah proyek yang telah berjalan mencapai 91 unit. Sedangkan pada 2013, nilai investasi mencapai US\$ 402,6 juta (BKPM 2014). Indonesia dan Taiwan memahami bahwa strategi kebijakan luar negeri dalam kerjasama ekonomi negara perlu *jump in* ke gerakan besar globalisasi untuk memperkuat daya saing mereka. Indonesia mengedepankan kekayaan alam dan jumlah penduduk yang besar sebagai pasar yang dimanfaatkan dari pelaku luar. Kemudian, Taiwan memiliki produk yang kompetitif dalam memperkuat persaingan pasar.

Indonesia dengan Taiwan membuka kantor dagang dan ekonomi Indonesia di Taipei menurut Kepres RI no 48 Tahun 1994. Suatu hal yang mendorong perekonomian Taiwan ialah ekspor ke Indonesia mencapai 15 miliar dolar AS dengan produk utama mesin, alat-alat listrik, dan teknologi tinggi. Taiwan juga menyumbang *Foreign Direct Investment* (FDI) yang cukup signifikan ke sejumlah *Host countries* di Asia (Shyntia Lo 2020). Kerjasama ekonomi telah dilakukan sejak lama. Laju pertumbuhan ekonomi Taiwan dan Indonesia dalam kerjasama ini akan memberikan keuntungan komprehensif. Menurut *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook* yang berjudul *Managing Divergent Recoveries* menyatakan bahwa kondisi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2020 menjadi 3,1% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 4,7%. Kenaikkan dalam presentase sekitar 1,5% menjadi faktor yang menguntungkan jika menjalin kerjasama ekonomi dengan Taiwan (IMF 2020).

Indonesia dan Taiwan memiliki keunggulan masing-masing yang bila dibangun hubungan kerjasama ekonomi dapat memberikan keuntungan bagi kedua negara. Hal yang perlu dilakukan yaitu penguatan komunikasi bilateral kedua negara melalui pendekatan *Business to Business*. Permasalahan implikasi kebijakan “Satu Tiongkok” dapat menjadi konsekuensi atau jalan kebijakan yang dapat mempermudah dalam kerjasama ekonomi Indonesia-Taiwan. Permasalahan kedaulatan Taiwan dengan Tiongkok dalam kawasan politik dapat dikatakan cukup rumit dan bisa memanas sewaktu-waktu. Hal ini perlu dikaji mengenai pengaruh permasalahan geopolitik yang terjadi antara Taiwan dengan Tiongkok terhadap perkembangan kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Dengan melihat implikasi *One China Policy*, Taiwan mengambil langkah untuk mengembangkan perekonomiannya dengan berusaha menjadi mitra negara-negara besar tanpa adanya persaingan. Taiwan tidak memproduksi produk untuk menjadi ekspor utama seperti negara Indonesia. Namun, Taiwan memproduksi suku cadang dan komponen yang dibutuhkan hampir di semua negara.

Dengan demikian, penyusunan skripsi terdapat ketertarikan dan merasa penting untuk melakukan penelitian yang dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi dalam kerjasama ekonomi Indonesia-Taiwan karena adanya implikasi kebijakan *One China Policy* “Satu Negara, Dua Sistem”. Dengan ini, dampak adanya kebijakan tersebut hubungan kerjasama ekonomi Indonesia dan Taiwan dapat terjalin dengan Taiwan diberikan otonomi khusus dan Indonesia memiliki kepentingan dalam penguatan diplomasi ekonomi antar negara. Terlepas dari permasalahan kedaulatan Taiwan sebagai negara dan hubungan diplomatik antar negara yang terbatas dikarenakan *One China Policy* tersebut, skripsi ingin mengkaji secara mendalam *One China Policy* yang memberikan implikasi terhadap kerjasama ekonomi Indonesia dengan Taiwan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang mengenai Implikasi *One China Policy* terhadap kerjasama ekonomi Indonesia dengan Taiwan, terlihat bahwa kebijakan *One China Policy* diakui oleh Indonesia sebagai kebijakan yang mengakui “Satu Tiongkok”. Dengan kebijakan ini mengartikan bahwa Indonesia hanya mengakui Tiongkok dan tidak mengakui Taiwan secara *de jure*. Dalam posisi hanya memberikan pengakuan “Satu Tiongkok” ini berimplikasi pada kerjasama ekonomi Indonesia-Taiwan. Dari rumusan masalah ini, skripsi ini mengangkat pertanyaan penelitian yakni “Mengapa adanya implikasi kebijakan *One China Policy* terhadap kerjasama ekonomi Indonesia dengan Taiwan?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai skripsi bertujuan untuk mengetahui implikasi kebijakan *One China Policy* terhadap kerjasama ekonomi Indonesia dengan Taiwan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan bagian dari skripsi yang berisi mengenai penjelasan yang menguntungkan dan kontribusi yang diperoleh dari pencapaian tujuan tersebut. Manfaat penelitian disusun guna memberikan wawasan yang luas dan membantu pembaca memahami bahan bacaan yang telah disusun.

1.4.1 Manfaat Akademis

Mengembangkan studi hubungan internasional dalam kajian hubungan ekonomi khususnya Indonesia dan Taiwan dengan memahami secara mendalam implikasi dari *One China Policy* terhadap kerjasama ekonomi Indonesia-Taiwan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Pemerintah Indonesia

Dapat menjadi bahan referensi dan rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia dalam menjalin kerjasama ekonomi dengan Taiwan di tengah pengimplementasian *One China Policy*.

2. Pelaku Usaha

Dapat menjadi tambahan wawasan tentang pendekatan *business to business* dalam kerjasama ekonomi Indonesia-Taiwan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat digunakan dalam kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan ekonomi. Penelitian kualitatif menurut Suwendra (2018) adalah kepekaan terhadap masalah yang ingin ditelaah secara mendalam di balik fenomena dalam konteks sosial (Suwendra 2018, 5). Skripsi menggunakan metode

penelitian kualitatif dalam menjelaskan tentang Implikasi *One China Policy* terhadap kerjasama ekonomi Indonesia dengan Taiwan.

1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian kualitatif dilakukan dengan prosedur tertentu dalam melakukan penelitian dengan cara yang benar. Jenis penelitian kualitatif yang akan dikumpulkan oleh skripsi berupa analisis pentingnya sebuah proses secara mendalam tentang proses terjadinya kerjasama ekonomi Indonesia dengan Taiwan. Dalam mendukung penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah studi dokumen dan tipe penelitian deskriptif analisis. Menurut Sugiyono (2018) studi dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono 2018, 326). Jenis studi dokumen dalam menggali sumber-sumber literatur atau dokumentasi yang dapat digunakan sebagai pelengkap bagi proses penelitian kualitatif. Oleh sebab itu, skripsi ini melakukan studi dokumen mengenai implikasi *One China Policy* terhadap kerjasama ekonomi Indonesia-Taiwan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Menurut Sutopo dan Arief (2010) dalam buku “Metodologi Penelitian Kualitatif” bahwa penelitian deskriptif analisis merupakan penggambaran dan analisis dari fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, dan pemikiran orang secara individu atau kelompok yang bersifat menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan (Suwendra 2018, 5). Penelitian deskriptif analisis digunakan untuk menjelaskan Implikasi *One China Policy* terhadap hubungan kerjasama ekonomi Indonesia dengan Taiwan. Tipe penelitian tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan memandang peristiwa secara keseluruhan.

1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber dan teknik pengolahan data penelitian kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan naratif baik tertulis berdasarkan data. Sumber data yang diperoleh menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2018, 308). Dalam penelitian ini, skripsi menggunakan data sekunder yang diperoleh berupa buku, jurnal, dan *website* resmi yang berkaitan dengan topik skripsi mengenai Implikasi *One China Policy* terhadap kerjasama ekonomi Indonesia dan Taiwan. Sumber penelitian sekunder merupakan sumber yang didapatkan secara tidak langsung. Skripsi ini menyesuaikan perolehan data dengan tujuan penelitian. Sumber data sekunder menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, seperti; buku, jurnal, dan *website* (Sangadji & Sopiah 2010, 44).

Tabel 1.1
Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data		Kelompok Data
Sekunder	Dokumentasi	a) Penelaahan mengenai pembahasan Implikasi <i>One China Policy</i> terhadap kerjasama ekonomi Indonesia-Taiwan diambil dari buku, jurnal, artikel dan <i>website</i> resmi.	b) Data terkait analisa <i>One China Policy</i> c) Data terkait bentuk kerjasama ekonomi Indonesia-Taiwan d) Data terkait hubungan Tiongkok, Indonesia, dan Taiwan yang terdapat dalam hubungan Implikasi <i>One China Policy</i>

Sumber: diolah penulis

Skripsi dapat melakukan penelitian dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dan juga perlu adanya teknik dalam pengumpulan data penelitian untuk memperoleh data yang tepat. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting* serta berbagai sumber yang

digunakan skripsi yaitu data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi (Sugiyono 2018, 308). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi (lihat Tabel 1.1). Skripsi menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yang berisi pembahasan yang serupa mengenai topik skripsi yaitu Implikasi *One China Policy* terhadap kerjasama ekonomi Indonesia dengan Taiwan yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, *website* resmi dan data-data yang tersimpan dalam lembaga-lembaga penelitian.

1.5.3 Teknik Validasi Data

Penelitian kualitatif melakukan uji validitas data yang mendalam berupa segala macam informasi yang kompleks. Validitas ditekankan sebagai suatu ketepatan dalam mendeskripsikan, menyimpulkan, menjelaskan, dan menginterpretasi hasil penelitian. Para ahli penelitian kualitatif menyediakan beberapa strategi untuk mencapai validitas data penelitian yang terdapat pada buku "*Validitas dan Realibilitas*" yaitu melalui 4 tahapan; kredibilitas, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian untuk menentukan apakah interpretasi penelitian didukung oleh bukti-bukti atau data-data yang ada (Karsadi 2022, 135).

1. Tahap kredibilitas data (*kredibility*), merupakan tahapan yang diperlukan kepentingan skripsi ini dapat memberikan jaminan bahwa penelitian yang terpercaya memiliki atribut yang kredibel (Karsadi 2022, 136). Sejalan dengan pengertian dari kredibilitas data, skripsi akan melakukan pengumpulan data yang nyata serta menginterpretasi data mengenai Implikasi *One China Policy* terhadap kerjasama ekonomi Indonesia-Taiwan dengan akurat.
2. Tahap keteralihan data (*transferability*), keteralihan data yaitu hak dan tanggung jawab sumber berikutnya yang hendak membandingkan hasil penelitiannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu (Karsadi 2022, 144). Pada Tahapan ini, keteralihan data berkaitan dengan sejauh mana uraian hasil analisis data penelitian dapat diaplikasikan pada pengaturan penelitian. Skripsi menguraikan dan menjelaskan secara detail mengenai

Implikasi *One China Policy* terhadap kerjasama ekonomi Indonesia dengan Taiwan. Dengan melihat konteks organisasi atau pemerintah Indonesia sebagai subjek yang termasuk dalam topik skripsi dan dapat mengkaji informasi-informasi yang terdapat dalam penelitian terdahulu secara kredibel.

3. Tahap ketergantungan data (*dependability*), merupakan penilaian akan kualitas proses pengumpulan data, analisis data, dan pengembangan teori berdasarkan data yang nyata di lapangan (Karsadi 2022, 144). Tahap ketergantungan dapat disimpulkan bahwa salah satu tahap yang secara keseluruhan mencakup ketepatan dan konsistensi hasil penelitian dalam kriteria yang menentukan bahwa penelitian dapat dipercaya kebenarannya. Sejalan dengan hal tersebut, skripsi akan melakukan pemeriksaan secara keseluruhan dan membuktikan bahwa hasil penelitian berbeda antara satu dengan yang lain mengenai tema secara garis besar membahas tentang *One China Policy* dan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Taiwan dengan pengaturan yang berbeda dengan penelitian terdahulu untuk mewujudkan hasil yang konsisten.
4. Tahapan kepastian data (*confirmability*), merupakan bahwa dalam jumlah besar orang mengalami hal yang sama, hasil penelitian tersebut objektif (Karsadi 2022, 145). Tahapan kepastian data pada penelitian kualitatif memberikan keyakinan bahwa hasil penelitian merupakan hasil analisis dari peristiwa atau pengalaman yang diungkapkan berdasarkan data yang diteliti, bukan sekedar pikiran dan analisis subjektif dari skripsi. Sejalan dengan hal tersebut, skripsi menggunakan data-data yang akurat dan relevan untuk dapat diuji dengan hasil yang nyata mengenai Implikasi *One China Policy* terhadap kerjasama ekonomi Indonesia dengan Taiwan.

Pada tahapan-tahapan tersebut untuk menguji validasi data skripsi, maka hasil penelitian akan dibantu dengan beberapa teknik yang dapat skripsi lakukan. berikut teknik-teknik untuk mencapai penelitian yang kredibel seiring dengan proses pengumpulan data. Validitas data

mengarahkan penyusunan skripsi untuk mengukur sejauh mana keabsahan suatu data melalui 4 tahapan pengukuran tersebut.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan tidak kaku. Setelah melakukan uji validasi data dan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan teknik analisis data. Di dalam penelitian kualitatif, tahap pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dianggap sebagai suatu kesinambungan yang dilakukan secara bersamaan sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Data dapat diolah dan dianalisis ketika data masih dikumpulkan (Karsadi 2022, 147). Dalam penyusunan skripsi dilakukan dengan mengumpulkan data lebih banyak lagi ditengah pengolahan analisis data sesuai kebutuhan. Disini data dapat berupa cuplikan, kutipan, atau penggalan dari catatan organisasi atau sebuah program, kemudian berupa terbitan dan laporan resmi. Analisis induktif yang akan digunakan dapat menguraikan penelitian secara penuh dan berfokus pada konteks untuk tetap pada pembahasan. Analisis yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta khusus (Suwendra 2018, 10).

Dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini memerlukan sebuah teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah “*analisis deskriptif*” sebagai level analisis data dalam membahas penjelasan secara mendalam mengenai Implikasi *One China Policy* terhadap kerjasama ekonomi Indonesia dengan Taiwan (Karsadi 2022, 149). Tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Tahap penyajian data, menggunakan analisis deskriptif untuk menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan adanya Implikasi *One China Policy* terhadap kerjasama ekonomi Indonesia dengan Taiwan.
2. Tahap komparasi data, adanya analisa menggunakan perbandingan-perbandingan data antara penelitian satu dengan yang lain mengenai data yang ditemukan serupa dengan

Implikasi *One China Policy* terhadap kerjasama ekonomi Indonesia dengan Taiwan. Kemudian, data-data diolah dan dianalisis yang dikembangkan menggunakan teori atau konsep yang digunakan.

3. Tahap penyajian hasil, hasil penelitian mengenai Implikasi *One China Policy* terhadap kerjasama ekonomi Indonesia dengan Taiwan. Dalam hasil penelitian, akan disajikan secara komprehensif dengan pengaturan yang sistematis dan terorganisir.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam menulis penelitian diperlukan sistem penulisan yang singkat, spekulatif dan fokus terhadap pembahasan. Proposal ini terdiri atas 4 bab, dalam bab-bab memiliki sub-bab yang sejalan dengan pembahasannya, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang tentang implikasi *One China Policy* terhadap kerjasama ekonomi Indonesia dengan Taiwan, rumusan masalah mengenai pembahasan tersebut, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan argumen utama yang menjelaskan permasalahan yang skripsi angkat. Beberapa acuan tinjauan pustaka dari sumber-sumber terdahulu yang dapat digunakan untuk literatur dan bahan perbandingan mengenai implikasi *One China Policy* terhadap kerjasama ekonomi Indonesia dengan Taiwan dan membangun kerangka pemikiran berdasarkan teori yang dipakai.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan isi dari data-data yang diperoleh sejalan dengan judul Implikasi *One China Policy* terhadap kerjasama ekonomi Indonesia dengan Taiwan. Dalam pembahasan akan berisi sub-bab untuk menjelaskan secara sistematis dan berkesinambungan mengenai topik skripsi. Sub-bab dalam pembahasan yaitu, *One China Policy*, Kerjasama Perdagangan Indonesia dengan Taiwan, Kerjasama Investasi Indonesia dengan Taiwan, Implikasi *One China Policy* Terhadap Kerjasama Ekonomi Indonesia dengan Taiwan, dan Strategi Indonesia Terhadap Taiwan Dalam Kerjasama Ekonomi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan rekomendasi mengenai pembahasan terkait dengan implikasi *One China Policy* terhadap kerjasama ekonomi Indonesia dengan Taiwan.